

Jenis Tulisan: Artikel penelitian

Evaluasi Pengelolaan Lanskap Permukiman Berbasis Green Concept dan Urban Sustainability di Kota Makassar Berdasarkan Strata Sosial dan Tipe Pengelolaan

Junardin Djamaluddin^{*1}, Hazairin Zubair², Tigin Dariati³¹ Ikatan Arsitek Lanskap Indonesia (IALI) Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar 90245, Indonesia¹ Program Studi Sanitasi Lingkungan, Politeknik Indonesia, Makassar 90245, Indonesia² Program Studi Ilmu Tanah, Departemen Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin, Makassar 90245, Indonesia³ Program Studi Agroteknologi, Departemen Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin, Makassar 90245, Indonesia**Corresponding Author:* Email jhun349.jd@gmail.comTulisan Diterima:
14 Juni 2025Tulisan Disetujui:
30 Juni 2025Kata kunci:
Green Concept,
Keberlanjutan Kota,
Lanskap
Permukiman, Strata
Sosial, Tipe
Pengelolaan
Kawasan*Keywords:*
Green Concept,
Management Type,
Residential
Landscape, Social
Strata, Urban
*Sustainability***ABSTRAK**

Pertumbuhan kawasan permukiman di Kota Makassar menghadirkan tantangan dalam pengelolaan lanskap yang berkelanjutan, terutama dalam penerapan prinsip *green concept* sebagai bagian dari pembangunan berwawasan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan lanskap permukiman berbasis *green concept* dalam perspektif *urban sustainability*, serta menganalisis perbedaannya berdasarkan strata sosial masyarakat dan tipe pengelolaan kawasan. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan paradigma positivisme, melalui pembobotan dan skoring indikator-indikator manajemen lanskap, kegiatan fisik pemeliharaan, dan peremajaan tanaman. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan observasi pada empat kawasan permukiman dengan total 120 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan lanskap berada pada kategori cukup (skor 2,98), dengan skor tertinggi pada aspek manajemen (3,16) dan terendah pada aspek peremajaan (2,93). Pengembangan lanskap lebih optimal ditemukan pada kawasan yang dikelola oleh developer dan dihuni masyarakat strata sosial menengah ke atas. Sebaliknya, kawasan yang dikelola oleh pemerintah/masyarakat serta dihuni oleh masyarakat menengah ke bawah menunjukkan kualitas lanskap yang lebih rendah. Temuan ini menunjukkan pentingnya peran tata kelola, dukungan kelembagaan, dan keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan lanskap permukiman yang berkelanjutan, serta memberikan rekomendasi untuk penguatan kebijakan pengelolaan lanskap berbasis *green concept* di tingkat lokal.

ABSTRACT

The rapid growth of residential areas in Makassar City presents challenges in achieving sustainable landscape management, particularly in implementing the principles of the green concept as part of environmentally conscious urban development. This study aims to evaluate residential landscape management based on the green concept within the framework of urban sustainability and to analyze differences in landscape quality based on social strata and types of management systems. A quantitative approach using a positivist paradigm was applied, utilizing scoring and weighting of indicators including landscape management, physical maintenance activities, and plant rejuvenation. Data were collected through questionnaires and field observations across four residential areas with a total of 120 respondents. The findings reveal that overall landscape management is categorized as fair (average score of 2.98), with the highest score in management (3.16) and the lowest in rejuvenation (2.93). Better landscape development was found in areas managed by developers and inhabited by middle to

upper-class communities, whereas areas managed by local governments or communities and inhabited by lower-income residents demonstrated lower quality landscapes. These results highlight the crucial role of governance, institutional support, and community involvement in creating sustainable residential landscapes and provide recommendations for strengthening green concept-based landscape management policies at the local level.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan kota-kota besar di Indonesia, termasuk Kota Makassar sebagai pusat kegiatan metropolitan di Kawasan Timur Indonesia, menunjukkan laju urbanisasi yang tinggi dalam dua dekade terakhir. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Kota Makassar mencapai lebih dari 1,5 juta jiwa pada tahun 2023 dan terus meningkat setiap tahun. Hal ini mendorong kebutuhan terhadap penyediaan hunian yang layak, sehat, dan terjangkau. Namun, pertumbuhan permukiman yang tidak diimbangi dengan perencanaan dan pengelolaan lanskap yang berkelanjutan berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan, menurunnya kualitas hidup, serta memperbesar ketimpangan spasial dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau kota.

Dalam menjawab tantangan keberlanjutan tersebut, konsep *green concept* atau konsep hijau menjadi pendekatan yang semakin diadopsi dalam perencanaan dan pengelolaan lanskap permukiman. Secara konseptual, *green concept* mengacu pada praktik pembangunan dan tata kelola lingkungan binaan yang berlandaskan prinsip-prinsip ekologis, efisiensi sumber daya, serta harmonisasi antara fungsi lingkungan, estetika visual, dan pelestarian alam (Irwan, 2008). Pendekatan ini meliputi tiga tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan lanskap yang dalam pelaksanaannya harus mempertimbangkan aspek-aspek fungsional, estetika, dan pelestarian lingkungan. Konsep ini menekankan keberlanjutan ekologis, kenyamanan visual, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Seiring meningkatnya perhatian global terhadap isu keberlanjutan, *green concept* dalam lanskap menjadi kerangka kerja utama yang menekankan integrasi proses alam, konservasi keaneka ragaman hayati, serta pemanfaatan teknologi dan sumber daya yang

efisien (Dharmadiatmika et al., 2023; Dragozova & Kovacheva, 2022; Plieninger et al., 2020; Simões et al., 2022; Ványolós et al., 2023). Dalam konteks lanskap permukiman, penerapan *green concept* tidak hanya mendukung keberlanjutan ekosistem, namun juga berkontribusi terhadap peningkatan kenyamanan visual, kualitas udara, serta kesejahteraan psikologis masyarakat penghuni.

Salah satu prinsip utama dalam *green concept* adalah integrasi pengetahuan ekologi ke dalam perencanaan lanskap, seperti pemilihan vegetasi berdasarkan daya adaptasi ekologis, konservasi air dan tanah, serta respons terhadap perubahan iklim (Izakovičová et al., 2019; Seydehmet et al., 2019; J. Zhang et al., 2021). Prinsip lainnya adalah pentingnya pelibatan pemangku kepentingan dalam seluruh proses perencanaan dan pengelolaan lanskap, untuk memastikan bahwa desain lanskap sesuai dengan kebutuhan lokal dan mendorong keberdayaan masyarakat (Dewi & Soemarwoto, 2023; Esmينو & Navarra, 2024). Selain itu, lanskap yang berfungsi secara ekologis juga diharapkan mampu menyediakan jasa ekosistem ganda, seperti pengendalian limpasan air, penyediaan ruang rekreasi, dan menyeimbangkan suhu mikro (Jin & Wang, 2023).

Meskipun demikian, penerapan konsep ini di Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Salah satu permasalahan utama adalah adanya ketimpangan pengelolaan lingkungan antara kawasan yang masih dikelola oleh pengembang (developer) dan kawasan yang telah diserahkan kepada pemerintah atau masyarakat. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa developer umumnya memiliki kemampuan teknis dan finansial yang lebih baik dalam menjaga kualitas lanskap (Oktringbo et al., 2022; J. Zhang et al., 2021). Sebaliknya, ketika tanggung jawab pengelolaan beralih ke pemerintah atau masyarakat, lanskap sering kali mengalami

degradasi akibat keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan lemahnya struktur kelembagaan (Sheikh et al., 2019; Friedman et al., 2020; Yatim et al., 2023).

Selain aspek pengelolaan, faktor strata sosial masyarakat juga turut memengaruhi kualitas lanskap permukiman. Lingkungan permukiman yang dihuni oleh kelompok ekonomi menengah ke bawah umumnya memiliki akses terbatas terhadap ruang terbuka hijau, infrastruktur yang kurang memadai, dan tingkat pemeliharaan lanskap yang rendah (Villaseñor & Escobar, 2022; Hazlehurst et al., 2024). Kondisi ini menimbulkan kesenjangan kualitas hidup antara kelompok sosial berbeda dan memperkuat pola segregasi spasial dalam kota (Gražulevičienė et al., 2020; Holliday et al., 2021).

Dalam konteks ini, *Urban Sustainability Theory* menjadi kerangka teoritis yang tepat. Teori ini menekankan pentingnya integrasi antara aspek sosial, ekonomi, dan ekologis dalam tata kelola kota yang berkelanjutan (Chen et al., 2023; Pogačar et al., 2022). Pendekatan seperti *eco-neighborhood* dan prinsip *new urbanism* menggarisbawahi pentingnya komunitas dalam desain permukiman berkelanjutan (Cheshmehzangi & Dawodu, 2021; Pellegrini & Chen, 2021). Namun, implementasi teori tersebut di Indonesia masih terbatas pada skala makro, belum banyak yang diterapkan pada tingkat mikro seperti lanskap permukiman.

Berdasarkan uraian dan temuan empiris yang ada, tampak jelas adanya kesenjangan penelitian, belum banyak studi di Indonesia yang secara sistematis mengevaluasi pengelolaan lanskap permukiman berbasis *green concept* dalam perspektif *urban sustainability*, terlebih lagi yang membandingkan pengaruh strata sosial dan sistem pengelolaan kawasan. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut.

Adapun unsur kebaruan dari penelitian ini terletak pada dua hal. Pertama, digunakannya pendekatan evaluatif kuantitatif dengan teknik pembobotan dan skoring terhadap indikator tahapan pendekatan *green concept*, yang memungkinkan analisis yang objektif dan

terstandar. Kedua, pendekatan komparatif berdasarkan dua variabel sosial-kontekstual, yaitu strata sosial dan tipe pengelolaan kawasan, yang belum banyak dieksplorasi dalam studi sejenis di Indonesia.

Lebih jauh, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dalam penguatan kebijakan pengelolaan lanskap permukiman yang lebih adaptif dan inklusif. Rekomendasi berbasis data empiris dapat digunakan untuk memperkuat kapasitas komunitas lokal, menyusun kebijakan insentif bagi developer, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan ruang terbuka hijau. Sebagaimana ditekankan dalam berbagai studi, pelibatan pemangku kepentingan merupakan kunci keberhasilan pengelolaan lanskap kota (Khachatryan et al., 2021; Baharuddin et al., 2022; Fobbe et al., 2024).

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah belum optimalnya pengelolaan lanskap permukiman di Kota Makassar dalam mewujudkan prinsip *green concept*, terutama pada kawasan menengah ke bawah dan yang telah diserahkan kepada pengelolaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kondisi tersebut dan menganalisis perbedaan kualitas lanskap berdasarkan variabel sosial dan kelembagaan. Melalui pendekatan kuantitatif evaluatif, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan dasar kebijakan pengelolaan lanskap yang lebih berkelanjutan dan adil secara sosial.

METODOLOGI

2.1. Lokasi dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi penelitian dipilih secara purposif pada empat kawasan permukiman yang merepresentasikan dua variabel utama, yaitu strata sosial masyarakat dan tipe pengelolaan kawasan. Strata sosial berdasarkan pada pertimbangan nilai rata-rata harga beli unit rumah pada kawasan tersebut dan tipe pengelolaan berdasarkan pada pertimbangan pengelolaan kawasan yang

masih dikelola oleh developer atau telah diserahkan kepada pemerintah/masyarakat.

Pemilihan lokasi ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman komparatif mengenai pengelolaan lanskap permukiman

berdasarkan kondisi sosial ekonomi warga dan sistem pengelolaan kawasan (Tabel 1). Penelitian ini berlangsung pada Maret 2025 hingga Mei 2025.

Tabel 1. Lokasi penelitian berdasarkan tipe pengelolaan dan strata sosial masyarakatnya

No.	Tipe Pengelolaan Kawasan	Strata Sosial Masyarakat	Kawasan Permukiman
1.	Dikelola oleh Developer	Menengah ke Atas	Bukit Baruga
2.	Dikelola oleh Developer	Menengah ke Bawah	Villa Mutiara
3.	Dikelola oleh Pemerintah/ Masyarakat	Menengah ke Atas	Panakukang Mas
4.	Dikelola oleh Pemerintah/ Masyarakat	Menengah ke Bawah	Bumi Tamalanrea Permai (BTP)

2.2. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma positivisme dengan pendekatan kuantitatif evaluatif. Metode ini dipilih untuk menilai secara objektif kualitas pengelolaan lanskap berdasarkan indikator pendekatan *green concept* melalui pengukuran terstandar, pembobotan, dan skoring. Penelitian ini juga bersifat deskriptif-komparatif karena membandingkan antar kelompok berdasarkan dua dimensi utama yaitu strata sosial dan tipe pengelolaan.

2.3. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah masyarakat kota Makassar. Sementara sampel penelitian untuk isian kuesioner adalah masyarakat yang berdomisili atau beraktifitas di kawasan objek penelitian dengan jumlah responden 120 dengan rincian 30 responden untuk setiap objek penelitian. Penentuan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* yaitu dengan pertimbangan responden dan partisipan dapat memberikan data yang diinginkan, mudah diajak komunikasi dan bersedia untuk berdiskusi serta memahami maksud penelitian.

2.4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan dua metode utama sebagai berikut.

a. Kuesioner

Instrumen kuantitatif berupa angket diberikan kepada 120 responden, masing-masing 30 responden dari setiap kawasan permukiman. Kuesioner mencakup pertanyaan terkait pengelolaan lanskap yang mencerminkan tiga aspek, yaitu manajemen, kegiatan fisik pemeliharaan, dan peremajaan tanaman (Tabel 2). Setiap pertanyaan diberi skala penilaian 1–5.

b. Observasi Lapangan

Observasi dilakukan terhadap elemen fisik lanskap seperti kebersihan, keteraturan, kondisi tanaman, keberadaan sarana peremajaan, dan pemeliharaan rutin. Hasil observasi dinilai menggunakan skema pembobotan dengan skala 1–5 untuk menjamin keterukuran data dan menguji konsistensi hasil kuesioner.

2.5. Analisis Data

Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Skoring hasil kuesioner dan observasi ditabulasi dan dirata-ratakan untuk masing-masing indikator. Skor akhir dibagi dalam empat kategori evaluatif:

- 1.0 – 2.0 = buruk
- 2.01 – 3.0 = cukup
- 3.01 – 4.0 = cukup baik
- 4.01 – 5.0 = baik

Analisis dilakukan secara komparatif untuk mengidentifikasi perbedaan kualitas pengelolaan lanskap antara kawasan berdasarkan strata sosial dan tipe pengelolaan. Validasi silang antara kuesioner dan observasi

dilakukan untuk meningkatkan reliabilitas hasil.

Tabel 2. Distribusi pengumpulan data berdasarkan indikator dan parameter variabel penelitian

No.	Variabel Penelitian	Sumber Data	Indikator	Parameter
1.	Pengelolaan lanskap kawasan permukiman	Kuesioner	Manajemen	Organisasi, SDM
			Kegiatan Fisik	Pembersihan, penyiangan, penggemburan, penyiraman, pemangkasan, penyulaman, pemupukan, hama dan penyakit
2.	Pengembangan lanskap permukiman	Observasi Lapangan	Peremajaan	Penggantian, pembibitan
			Aspek fisik lanskap	Kebersihan, keteraturan, kondisi tanaman, keberadaan sarana peremajaan, dan pemeliharaan rutin

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Evaluasi Pengelolaan dan Pemeliharaan Lanskap Permukiman Berbasis *Green Concept*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan lanskap permukiman di Kota Makassar berbasis *green concept* secara umum

masih berada pada kategori cukup, dengan nilai pembobotan rata-rata sebesar 2,98 (Tabel 3). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya dalam pemeliharaan dan pengelolaan lanskap, pelaksanaannya belum optimal dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip keberlanjutan sebagaimana ditekankan dalam *green concept* (Plieninger et al., 2020; Dharmadiatmika et al., 2023; Ványolós et al., 2023).

Tabel 3. Pengelolaan dan pemeliharaan lanskap kawasan permukiman di Kota Makassar berbasis *green concept*

Pengelolaan Lanskap		Panakukang	Bukit	BTP	Villa	Rata-Rata	
Indikator	Parameter	Mas	Baruga		Mutiara		
Manajemen	Organisasi	1,9	4,6	2,2	4	3,18	3,16
	Sumberdaya	2,7	4,5	2,1	3,3	3,15	
Fisik	Pembersihan	4	4,6	2	3,1	3,43	2,94
	Penyiangan	2,2	4	1,7	2,9	2,7	
	Penyiraman	2,9	4,3	1,8	3,3	3,08	
	Pemangkasan	3	4,6	1,6	3,5	3,18	
	Penyulaman	2,6	3,9	1,8	2,8	2,78	
	Pemupukan	2,4	3,8	1,7	3	2,73	
	Hama & Penyakit	3	3,9	2,1	1,9	2,73	
Peremajaan	Penggantian	2,6	1,8	1,8	2,8	2,78	2,93
	Pembibitan	2,3	1,5	1,5	3,7	3,08	
Rata-Rata		2,69	4,26	1,84	3,12	2,98	

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2025

Penilaian terhadap tiga indikator utama, yaitu manajemen organisasi, kegiatan fisik pemeliharaan, dan peremajaan tanaman menunjukkan variasi hasil yang

menggambarkan dimensi teknis dan kelembagaan dalam pengelolaan lanskap. Indikator manajemen memperoleh nilai rata-rata 3,16, tergolong cukup baik, menunjukkan

bahwa secara kelembagaan, sebagian besar kawasan permukiman telah memiliki struktur organisasi dan sumber daya manusia yang mendukung. Hal ini utamanya berlaku pada kawasan yang masih dikelola oleh developer, di mana tersedia tim pengelola yang khusus menangani perawatan lanskap. Namun demikian, seperti ditegaskan oleh Esmino dan Navarra (2024), keberadaan organisasi saja tidak cukup tanpa sistem tata kelola dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan yang berfungsi secara efektif.

Indikator kegiatan fisik pemeliharaan memperoleh skor 2,94, atau dalam kategori cukup. Ini mencakup kegiatan seperti penyiraman, pemangkasan, penyiangan, pemupukan, serta pengendalian hama dan penyakit. Kondisi ini mengindikasikan bahwa banyak kawasan permukiman, terutama yang telah diserahkan kepada masyarakat atau pemerintah, tidak melakukan pemeliharaan lanskap secara intensif. Kurangnya pengetahuan teknis hortikultura serta minimnya pendanaan menjadi faktor penghambat utama. Padahal, menurut Zhang et al. (2021), pemilihan dan pemeliharaan vegetasi yang sesuai dengan klasifikasi hortikultura dan kondisi ekologis lokal merupakan inti dari pengelolaan lanskap berbasis *green concept*.

Lebih lanjut, indikator kegiatan peremajaan tanaman memperoleh skor 2,93, juga dalam kategori cukup. Kegiatan ini mencakup penyulaman, penggantian tanaman yang rusak atau mati, serta pembibitan. Dalam konteks ini, kawasan yang dikelola oleh developer menunjukkan kinerja lebih baik karena

umumnya memiliki fasilitas pembibitan internal. Sebaliknya, kawasan yang telah diserahkan kepada masyarakat cenderung bergantung pada kondisi spontan tanpa perencanaan pembibitan yang berkelanjutan. Ketidaksinambungan dalam peremajaan lanskap ini memperlihatkan lemahnya sistem manajemen lanskap jangka panjang sebagaimana ditekankan dalam prinsip desain berkelanjutan (Kawther & Hassan, 2021; Jin & Wang, 2023).

Dari ketiga indikator tersebut, diketahui bahwa pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan lanskap permukiman di Kota Makassar belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *green concept* secara utuh. Pengelolaan lanskap permukiman masih bersifat sektoral, terbatas pada perawatan dasar, dan belum melibatkan pendekatan ekologis, partisipatif, serta multifungsi sebagaimana dianjurkan dalam teori *urban sustainability* (Dharmadiatmika et al., 2023; Geng & Zhu, 2021).

3.2. Pengembangan Lanskap Permukiman Berdasarkan Strata Sosial dan Tipe Pengelolaan Kawasan

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam kualitas lanskap antara kelompok masyarakat menengah ke atas dan menengah ke bawah, serta antara kawasan yang masih dikelola oleh developer dan kawasan yang pengelolaannya telah diserahkan kepada masyarakat atau pemerintah (Tabel 4).

Tabel 4. Pengembangan lanskap kawasan permukiman di Kota Makassar berdasarkan strata sosial masyarakatnya

Menengah Ke Bawah		Menengah Ke Atas	
Kawasan Permukiman	Rata-Rata	Kawasan Permukiman	Rata-Rata
BTP	2,06	Panakukang Mas	2,39
Villa Mutiara	2,83	Bukit Baruga	4,17
Rata-Rata	2,44	Rata-Rata	3,28

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2025

Berdasarkan strata sosial, kawasan menengah ke atas seperti Bukit Baruga dan Panakukang Mas menunjukkan skor rata-rata

pengembangan lanskap 3,28 (kategori cukup baik), sementara kawasan menengah ke bawah seperti BTP dan Villa Mutiara memperoleh

skor rata-rata 2,44 (kategori cukup). Kesenjangan ini mencerminkan bagaimana daya beli dan kapasitas ekonomi masyarakat berdampak pada kualitas lingkungan tempat tinggalnya (Hazlehurst et al., 2024; Villaseñor & Escobar, 2022). Masyarakat menengah ke atas umumnya mampu mendanai kontribusi pengelolaan lingkungan, serta memiliki akses lebih besar terhadap informasi dan fasilitas penghijauan yang baik.

Menariknya, walaupun strata sosial berpengaruh, faktor tipe pengelolaan kawasan memiliki kontribusi yang lebih determinan (Tabel 5). Kawasan yang masih dikelola oleh developer, baik itu strata atas maupun bawah,

memiliki nilai pengembangan lanskap 3,50 (kategori cukup baik). Sebaliknya, kawasan yang dikelola oleh pemerintah/masyarakat hanya mencapai 2,22 (kategori cukup). Fakta ini menunjukkan bahwa keberadaan manajemen terstruktur, dukungan dana, dan tanggung jawab kelembagaan dari pihak developer menjadi faktor penentu utama keberlanjutan lanskap (Oktringbo et al., 2022). Sementara itu, pada kawasan yang telah diserahkan, minimnya pengawasan, lemahnya partisipasi warga, dan keterbatasan dana publik menjadi tantangan besar.

Tabel 5. Pengembangan lanskap kawasan permukiman di Kota Makassar berdasarkan tipe pengelolaan kawasan

Pemerintah dan Masyarakat		Developer	
Kawasan Permukiman	Rata-Rata	Kawasan Permukiman	Rata-Rata
BTP	2,06	Panakukang Mas	2,83
Villa Mutiara	2,39	Bukit Baruga	4,17
Rata-Rata	2,22	Rata-Rata	3,50

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2025

Temuan ini sejalan dengan teori *Urban Sustainability*, di mana kolaborasi kelembagaan dan perencanaan spasial berkelanjutan menjadi pilar utama dalam menciptakan lingkungan hunian yang sehat, inklusif, dan adaptif (Cheshmehzangi & Dawodu, 2021; Pogačar et al., 2022). Di sisi lain, perbedaan ini juga memperkuat pernyataan bahwa akses terhadap lanskap berkualitas sering kali menjadi hak istimewa kelompok sosial tertentu, yang mengarah pada ketimpangan spasial dalam konteks keadilan ekologis (Gražulevičienė et al., 2020).

Meskipun demikian, terdapat potensi pada pengelolaan oleh komunitas yang belum sepenuhnya diberdayakan. Dengan dukungan kebijakan yang kuat, penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, serta insentif partisipatif, model pengelolaan bersama dapat dikembangkan seperti yang disarankan dalam praktik *community-based forest management* (Friedman et al., 2020; Yatim et al., 2023). Hal ini penting mengingat perumahan rakyat dan strata sosial bawah menyumbang porsi

terbesar permukiman di Kota Makassar, sehingga peningkatan kualitas lanskap pada kelompok ini akan berkontribusi signifikan terhadap keberlanjutan kota secara keseluruhan.

3.3. Integrasi Temuan dengan Teori dan Implikasi Kebijakan

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperkuat relevansi penggunaan *Urban Sustainability Theory* sebagai landasan analisis. Kualitas lanskap permukiman tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis dan estetika, tetapi juga oleh tata kelola, kemampuan ekonomi warga, dan pola hubungan antar aktor (Dragozova & Kovacheva, 2022; Esmينو & Navarra, 2024). Penelitian ini juga menegaskan pentingnya pengelolaan lanskap berbasis indikator kuantitatif, sebagai instrumen evaluatif yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan spasial yang adil dan berbasis data (Simões et al., 2022; Y. Zhang et al., 2023).

Dari hasil ini, dapat diajukan rekomendasi penting bagi Pemerintah Kota Makassar untuk memperkuat dukungan terhadap kawasan strata menengah ke bawah, khususnya dalam hal pengelolaan lanskap. Hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme subsidi pemeliharaan lingkungan, pembentukan unit pengelola RTH di tingkat kelurahan, atau penyediaan insentif bagi developer yang membangun permukiman ramah lingkungan secara inklusif. Pendekatan ini selaras dengan arahan kebijakan lingkungan nasional dalam UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan penegakan prinsip pembangunan berkelanjutan (Hastono et al., 2023; Sitorus et al., 2022).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan lanskap permukiman di Kota Makassar secara umum berada pada kategori cukup, dengan nilai tertinggi pada aspek manajemen dan terendah pada aspek peremajaan tanaman. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya implementasi prinsip *green concept* dalam pengelolaan lanskap permukiman, terutama pada kawasan yang telah diserahkan kepada pemerintah atau masyarakat.

Temuan juga mengungkapkan bahwa baik strata sosial maupun tipe pengelolaan kawasan berpengaruh signifikan terhadap kualitas lanskap, dengan kawasan menengah ke atas dan yang masih dikelola developer menunjukkan hasil yang lebih baik. Penelitian ini menegaskan bahwa kolaborasi kelembagaan, dukungan pembiayaan, dan kapasitas partisipatif masyarakat menjadi faktor penentu dalam mewujudkan lanskap permukiman yang berkelanjutan. Dengan demikian, perlu adanya intervensi kebijakan dan penguatan kelembagaan komunitas agar prinsip *urban sustainability* dapat diterapkan secara merata di seluruh kawasan permukiman, termasuk yang berstrata sosial menengah ke bawah.

Evaluasi kuantitatif berbasis indikator *green concept* dalam studi ini dapat digunakan

sebagai alat bantu perencanaan dan pengambilan kebijakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan secara berkeadilan.

REFERENSI

- Baharuddin, H. E. A., Ismail, N. A. A., Adnan, H., Ismail, W. N. W., & Piri, I. (2022). Cross Case Analysis on Internal Early Preparation of Stakeholder Engagement for Infrastructure Projects. *Iop Conference Series Earth and Environmental Science*, 1067(1), 12072. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1067/1/012072>
- Chen, J., Pellegrini, P., Yang, Z., & Wang, H. (2023). Strategies for Sustainable Urban Renewal: Community-Scale GIS-Based Analysis for Densification Decision Making. *Sustainability*, 15(10), 7901. <https://doi.org/10.3390/su15107901>
- Cheshmehzangi, A., & Dawodu, A. (2021). Towards a Sustainable Energy Planning Strategy: The Utilisation of Floor Area Ratio for Residential Community Planning and Design in China. *Frontiers in Sustainable Cities*, 3. <https://doi.org/10.3389/frsc.2021.687895>
- Dewi, R., & Soemarwoto, R. (2023). *Designing the Structure of the Environmental Education Curriculum Through the Landscape and Contextualism Approach in Indramayu Regency, Indonesia*. <https://doi.org/10.57030/23364890.cemj.31.1.94>
- Dharmadiatmika, I. M. A., Saputra, K. E., Kohdrata, N., & Yamagami, H. (2023). Study of Design Criteria for the Ayung River Estuary Area as an Urban Riverfront Park in Denpasar City, Bali. *Sinergi*, 27(3), 371. <https://doi.org/10.22441/sinergi.2023.3.008>
- Dragozova, E., & Kovacheva, S. (2022). *Modeling Landscape Architects' Competences for Sustainable Management of Green Infrastructure*. <https://doi.org/10.3846/bm.2022.693>
- Esmينو, H. G. R., & Navarra, N. L. (2024).

- ReCab: Most Sustainable Post-Rehabilitation Development for the Former Cabanatuan City Dumpsite Through Integrated Landscape Approach. *Iop Conference Series Earth and Environmental Science*, 1384(1), 12003. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1384/1/012003>
- Fobbe, L., Niss, C., & Hilletoft, P. (2024). Continuous and Changing Stakeholder Engagement for Organisational Sustainability: Proposing the Stakeholder Engagement Flow Model. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 31(6), 6061–6074. <https://doi.org/10.1002/csr.2908>
- Friedman, R., Guerrero, A. M., McAllister, R. R. J., Rhodes, J. R., Santika, T., Budiharta, S., Indrawan, T. P., Hutabarat, J. A., Kusworo, A., Yogaswara, H., Meijaard, E., John, F. A. V. St., Struebig, M. J., & Wilson, K. A. (2020). Beyond the Community in Participatory Forest Management: A Governance Network Perspective. *Land Use Policy*, 97, 104738. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104738>
- Geng, Z., & Zhu, Z. (2021). Municipal Infrastructure Management Using Smart City Landscape Design and Sustainable Architecture Technologies. *Open House International*, 46(4), 563–577. <https://doi.org/10.1108/ohi-12-2020-0169>
- Gražulevičienė, R., Andrušaitytė, S., Gražulevičius, T., & Dėdelė, A. (2020). Neighborhood Social and Built Environment and Disparities in the Risk of Hypertension: A Cross-Sectional Study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(20), 7696. <https://doi.org/10.3390/ijerph17207696>
- Hastono, B., Utama, Y. Y., & Yunanto, Y. (2023). *Effectiveness of Imposing Criminal Sanctions on Dumping Activities of Hazardous Toxic Waste in the Form of Spent Bleaching Earth (SBE) (Reflection on Criminal Cases)*. <https://doi.org/10.4108/eai.27-7-2022.2326247>
- Hazlehurst, M. F., Hajat, A., Szpiro, A. A., Tandon, P. S., Kaufman, J. D., Loftus, C. T., Bush, N. R., LeWinn, K. Z., Hare, M. E., Sathyanarayana, S., & Karr, C. J. (2024). Individual and Neighborhood Level Predictors of Children’s Exposure to Residential Greenspace. *Journal of Urban Health*, 101(2), 349–363. <https://doi.org/10.1007/s11524-024-00829-z>
- Holliday, C. N., Bevilacqua, K., Grace, K. T., Denhard, L., Kaur, A., Miller, J., & Decker, M. R. (2021). Examining the Neighborhood Attributes of Recently Housed Partner Violence Survivors in Rapid Rehousing. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(8), 4177. <https://doi.org/10.3390/ijerph18084177>
- Irwan, Z. D. (2008). *Tantangan Lingkungan dan Lansekap Hutan Kota* (Cetakan ke 2). Bumi aksara 2008.
- Izakovičová, Z., Miklós, L., Miklósová, V., & Petrovič, F. (2019). The Integrated Approach to Landscape Management — Experience From Slovakia. *Sustainability*, 11(17), 4554. <https://doi.org/10.3390/su11174554>
- Jin, L., & Wang, Y. (2023). The Practice and Potential of the SITES V2 Rating System for the Sustainable Design of a Landscape: A Case Study of Chicago’s Navy Pier. *Frontiers in Environmental Science*, 11. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2023.966726>
- Kawther, K. K., & Hassan, R. H. (2021). The Sustainable Design Rules of Landscape. *E3s Web of Conferences*, 318, 4011. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202131804011>
- Khachatryan, H., Rihn, A., Zhang, X., & Dukes, M. D. (2021). Towards Sustainable Urban Landscape Management: Floridians’ Perceptions of Residential Landscapes and Their

- Maintenance Requirements. *Edis*, 2021(2), 5. <https://doi.org/10.32473/edis-fe1090-2021>
- Okringbo, J. I., Chukuigwe, O., & Sikpi, E. E. (2022). Effectiveness of Shell Petroleum Development Company's Communication Strategies in Promotion of Environmental Degradation Management in Niger Delta, Nigeria. *Journal of Agripreneurship and Sustainable Development*, 5(1), 180–189. <https://doi.org/10.59331/jasd.v5i1.300>
- Pellegrini, P., & Chen, J. (2021). *Sustainable Urban Renewal and Densification in China: The Case of Suzhou in the Yangtze River Delta Region*. <https://doi.org/10.20944/preprints202104.0735.v1>
- Plieninger, T., Muñoz-Rojas, J., Buck, L., & Scherr, S. (2020). Agroforestry for Sustainable Landscape Management. *Sustainability Science*, 15(5), 1255–1266. <https://doi.org/10.1007/s11625-020-00836-4>
- Pogačar, K., Žižek, A., & Šenk, P. (2022). Mapping the Transformation Potential of Streets Using Urban Planning Parameters and Open Spatial Datasets. *Sustainability*, 14(14), 8563. <https://doi.org/10.3390/su14148563>
- Seydehmet, J., Lv, G., & Abliz, A. (2019). Landscape Design as a Tool to Reduce Soil Salinization: The Study Case of Keriya Oasis (NW China). *Sustainability*, 11(9), 2578. <https://doi.org/10.3390/su11092578>
- Sheikh, Y., Ibrar, M., & Iqbal, J. (2019). Impact of Joint Forest Management on Rural Livelihoods in the Kalam and Siran Forest Divisions, Khyber Pakhtunkhwa Pakistan. *Global Regional Review*, IV(I), 225–237. [https://doi.org/10.31703/grr.2019\(iv-i\).25](https://doi.org/10.31703/grr.2019(iv-i).25)
- Simões, P., Matos, R. S., Costa, P. M. F. da, Castro, C., & Ferreira, P. T. (2022). *Green and Blue Infrastructures as a Model of Sustainable Urban Planning—Landscape Design for Praça De Espanha in Lisbon—Portugal*. 215–228. https://doi.org/10.1007/978-3-030-86499-6_19
- Sitorus, N., Ginting, B., Sunarmi, S., & Siregar, M. (2022). *Environmental Management Law Policy in Indonesia Towards People's Prosperity*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220204.013>
- Ványolós, E., Henning, I. A., Lihät, I., & Szabó, B. (2023). The Ecological Perspective in Nowadays' Urban Landscape Planning in Transylvania. *Acta Biologica Marisiensis*, 6(2), 50–61. <https://doi.org/10.2478/abmj-2023-0011>
- Villaseñor, N. R., & Escobar, M. A. H. (2022). Linking Socioeconomics to Biodiversity in the City: The Case of a Migrant Keystone Bird Species. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 10. <https://doi.org/10.3389/fevo.2022.850065>
- Yatim, H., Yusran, Y., Supratman, S., & Zaman, N. (2023). Collaborative Management to Support Sustainable Community Forest. *Iop Conference Series Earth and Environmental Science*, 1131(1), 12014. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1131/1/012014>
- Zhang, J., Cenci, J., & Becue, V. (2021). A Preliminary Study on Industrial Landscape Planning and Spatial Layout in Belgium. *Heritage*, 4(3), 1375–1387. <https://doi.org/10.3390/heritage4030075>
- Zhang, Y., Zhang, J., Wang, F., & Yang, W. (2023). Spatiotemporal Landscape Pattern Analyses Enhanced by an Integrated Index: A Study of the Changbai Mountain National Nature Reserve. *Remote Sensing*, 15(7), 1760. <https://doi.org/10.3390/rs15071760>